

KOPERASI DESA MERAH PUTIH (KDMP) SEBAGAI PENGUAT KETAHANAN EKONOMI DESA DI TENGAH GEJOLAK EKONOMI NASIONAL DAN GLOBAL

Rosti Setiawati

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir perubahan ekonomi global menunjukkan tingkat ketidakpastian yang semakin tinggi. Fluktuasi harga energi, ketegangan geopolitik, inflasi, perubahan kebijakan perdagangan internasional serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia menjadi faktor yang mempengaruhi stabilitas ekonomi berbagai negara. Dana Moneter Internasional bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia tertahan pada kisaran tiga persen, sebuah angka yang mencerminkan pemulihan yang rapuh dan tidak merata antarkawasan. Bagi negara berkembang yang terbuka terhadap perdagangan dan arus modal seperti Indonesia, gejolak semacam ini bukan sekadar persoalan statistik makro, melainkan tekanan nyata yang berimbas hingga ke harga kebutuhan pokok, biaya produksi petani, dan daya beli rumah tangga di tingkat paling bawah.

Di tengah tekanan eksternal tersebut, perekonomian Indonesia memang menunjukkan ketahanan yang relatif baik, dengan pertumbuhan yang masih bertumpu pada konsumsi domestik dan inflasi yang terjaga dalam rentang sasaran. Desa, yang menjadi tempat tinggal sebagian besar penduduk dan sumber utama produksi pangan, justru kerap menjadi pihak yang paling rentan ketika harga berfluktuasi. Rantai distribusi yang panjang, keterbatasan akses permodalan, serta dominasi tengkulak dan pelepas uang membuat nilai tambah dari kegiatan ekonomi desa banyak terserap oleh perantara, bukan oleh produsen di hulu.

Merespons kondisi tersebut, pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang selanjutnya disingkat KDMP, sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan. Program ini dilandasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan ditargetkan menjangkau seluruh desa dan kelurahan di Indonesia, lebih dari delapan puluh ribu unit yang kelembagaannya diresmikan pada pertengahan 2025 (Sekretariat Presiden Republik Indonesia, 2025). KDMP dirancang bukan sekadar sebagai badan usaha simpan pinjam, melainkan sebagai pusat layanan ekonomi desa terpadu yang menggabungkan gerai kebutuhan pokok, pergudangan, layanan logistik, hingga fasilitas kesehatan dalam satu kawasan.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, KDMP tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai institusi sosial ekonomi yang mampu membangun ketahanan ekonomi masyarakat lokal

Pemilihan desa sebagai pusat perhatian bukan tanpa alasan. Desa bukan sekadar wilayah administratif, melainkan basis produksi pangan, ruang hidup mayoritas penduduk, sekaligus titik temu antara ekonomi rakyat dan kebijakan negara. Ketika guncangan ekonomi datang, kemampuan desa untuk bertahan turut menentukan stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan. Karena itu, memperkuat ekonomi desa bukan agenda yang terpisah dari pengelolaan ketahanan ekonomi nasional, melainkan bagian yang menyatu dengannya. Inisiatif menempatkan koperasi sebagai motor ekonomi desa perlu dilihat

dalam bingkai yang lebih luas, yaitu sebagai upaya membangun fondasi ekonomi yang dimulai dari unit terkecil masyarakat.

Pengembangan KDMP dengan menempatkannya dalam konteks gejala ekonomi nasional dan global, pertanyaan yang menjadi pijakan adalah sejauh mana koperasi desa dapat berfungsi sebagai penyangga ketahanan ekonomi ketika tekanan datang dari luar yang sulit dikendalikan. Pembahasan diarahkan untuk tidak berhenti pada deskripsi program, melainkan menelaah secara kritis posisi strategis KDMP, tantangan yang membayangnya, serta strategi pengembangan yang diperlukan agar koperasi ini tidak berhenti sebagai proyek administratif, tetapi tumbuh menjadi institusi ekonomi yang hidup dan berkelanjutan.

Gejolak Ekonomi Nasional dan Global serta Tekanannya terhadap Ekonomi Desa

Memahami urgensi KDMP menuntut pemikiran yang jernih atas sumber gejala ekonomi yang sedang berlangsung. Pada tataran global, ketidakpastian berakar pada tiga hal yang saling menguatkan. Pertama, fragmentasi perdagangan akibat kebijakan proteksi dan perang tarif yang membuat arus barang antarnegara menjadi lebih mahal dan kurang dapat diprediksi. Kedua, ketegangan geopolitik, termasuk konflik di kawasan strategis, yang berimbas pada harga energi dan jalur logistik dunia. Ketiga, kebijakan moneter negara maju yang menjaga suku bunga tetap tinggi, sehingga menekan nilai tukar mata uang negara berkembang dan menaikkan biaya pembiayaan.

Ketiga faktor itu tidak berhenti di ruang kebijakan makro. Pelemahan nilai tukar mendorong kenaikan harga barang impor, termasuk pupuk, pakan ternak, dan bahan baku yang banyak digunakan oleh produsen kecil di pedesaan. Gangguan rantai pasok memperpanjang waktu dan biaya distribusi, sementara volatilitas harga komoditas membuat pendapatan petani dan nelayan menjadi sukar diperkirakan dari musim ke musim. Dengan kata lain, guncangan yang bermula dari pusat keuangan dunia pada akhirnya terasa pada selisih harga yang diterima petani dan harga yang dibayar konsumen di pasar desa.

Pada tataran nasional, pemerintah menempuh sejumlah langkah untuk meredam dampak gejala, mulai dari penguatan ketahanan pangan dan energi hingga pembentukan satuan tugas percepatan pertumbuhan ekonomi (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2026). Indikator makro memperlihatkan stabilitas yang terjaga, namun pertumbuhan yang sehat pada level nasional belum menjamin pemerataan manfaat sampai ke desa. Persoalan struktural ekonomi desa tetap bertahan, yaitu ketergantungan pada satu atau dua komoditas, lemahnya posisi tawar produsen terhadap perantara, serta minimnya kelembagaan ekonomi lokal yang mampu menghimpun dan mengelola sumber daya warga secara kolektif.

Mekanisme ini penting dipahami agar respons kebijakan tidak salah sasaran. Guncangan global tidak menyerang desa secara langsung, melainkan melewati serangkaian saluran, mulai dari nilai tukar, harga energi, biaya logistik, hingga ekspektasi pasar. Pada setiap saluran itu, posisi produsen desa cenderung lemah karena keterbatasan informasi dan ketiadaan kelembagaan yang mampu menahan tekanan. Petani yang menjual hasil secara individual kepada pengepul, misalnya, hampir tidak memiliki ruang untuk menawar ketika harga jatuh, sementara biaya pupuk dan sarana produksi yang dipengaruhi harga impor terus membebani. Literatur perkoperasian internasional menunjukkan bahwa kelembagaan

kolektif membantu petani kecil menekan biaya transaksi sekaligus memperkuat posisi tawar pada pasar yang timpang (Blekking et al., 2021; Kustepeli et al., 2023). Ketimpangan posisi inilah yang membuat dampak gejala terasa lebih berat di desa dibandingkan di pusat ekonomi yang memiliki akses lebih luas terhadap pembiayaan dan pasar.

Di titik inilah relevansi koperasi sebagai institusi ekonomi kerakyatan menemukan pijakannya. Hatta (2015) sejak lama menegaskan bahwa koperasi merupakan jalan untuk membangun kekuatan ekonomi rakyat yang lemah melalui kerja sama dan kebersamaan, bukan melalui persaingan individu yang timpang. Gagasan ini sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Ketika tekanan eksternal menguat, kelembagaan kolektif yang berakar pada solidaritas warga justru berpotensi menjadi penyangga yang efektif, karena mampu mengumpulkan sumber daya yang terpecah dan menegosiasikan posisi yang lebih kuat di pasar.

Koperasi Desa Merah Putih: Landasan Kebijakan dan Arsitektur Kelembagaan

KDMP berpijak pada kerangka hukum dan kebijakan yang cukup tegas. Selain Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang menjadi payung percepatan pembentukan, program ini ditopang skema pembiayaan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan koperasi desa dan kelurahan. Secara filosofis, KDMP tetap merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan kerangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menjadikan asas kekeluargaan dan keanggotaan sukarela sebagai fondasi tata kelolanya. Kombinasi landasan konstitusional, regulasi teknis, dan dukungan fiskal ini menjadikan KDMP berbeda dari gelombang program koperasi sebelumnya yang kerap berhenti pada tahap pembentukan tanpa sokongan kelembagaan yang memadai.

Arsitektur kelembagaan KDMP dirancang sebagai pusat ekonomi desa terpadu. Setiap unit diproyeksikan memiliki gerai kebutuhan pokok, fasilitas simpan pinjam, gudang penyimpanan termasuk cold storage, apotek dan klinik desa, serta sarana logistik berupa kendaraan pengangkut. Desain bangunan bahkan telah dibakukan melalui keputusan menteri terkait, sehingga standar fisik antarunit relatif seragam. Model multifungsi ini bertujuan menyatukan berbagai layanan yang selama ini terpecah agar warga desa dapat memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi dalam satu kawasan, sekaligus memangkas mata rantai distribusi yang panjang.

Dari sisi pembiayaan, KDMP memperoleh dukungan likuiditas dari perbankan milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara, dengan skema pinjaman berbunga relatif rendah dan tenor menengah. Penjaminan pemerintah serta pengaturan sumber pengembalian melalui dana transfer ke daerah dirancang untuk menekan risiko kredit bagi perbankan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Skema ini memperlihatkan keberpihakan fiskal yang nyata, namun sekaligus menyimpan konsekuensi yang perlu dicermati, yaitu beban kewajiban yang melekat pada koperasi sejak hari pertama beroperasi. Pembiayaan berbasis utang menuntut arus kas usaha yang sehat agar koperasi tidak terjebak pada persoalan likuiditas di kemudian hari.

Secara teoritis, perbedaan antara koperasi yang sekadar berdiri secara administratif dan koperasi yang benar-benar berfungsi terletak pada apa yang dalam literatur perkoperasian

disebut sebagai *member promotion*, yaitu kemampuan koperasi memberikan manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh anggota. Ropke (2012) menekankan bahwa keunggulan koperasi tidak ditentukan oleh besarnya modal atau banyaknya unit usaha, melainkan oleh sejauh mana ia mampu menurunkan biaya transaksi dan memperbaiki posisi anggota di pasar. Tolok ukur ini penting untuk menilai KDMP, sebab keberhasilannya tidak boleh diukur semata dari jumlah unit yang terbentuk, tetapi dari nilai tambah yang benar-benar diterima warga desa sebagai anggota dan pemilik koperasi. Kajian terkini menegaskan bahwa organisasi tani yang efektif merupakan instrumen penting bagi pembangunan berkelanjutan ketika benar-benar berorientasi pada kepentingan anggotanya (Ma, Marini, & Rahut, 2023).

Posisi KDMP dalam Memperkuat Ketahanan Ekonomi Desa

Ketahanan ekonomi desa dapat dipahami sebagai kemampuan komunitas desa untuk menyerap guncangan, beradaptasi terhadap tekanan, dan tetap mempertahankan fungsi ekonomi dasarnya ketika kondisi eksternal memburuk. Dalam kerangka ini, KDMP berpotensi memainkan beberapa peran yang saling berkaitan. Peran pertama berkaitan dengan memperpendek rantai distribusi. Dengan bertindak sebagai agregator hasil produksi sekaligus penyalur kebutuhan pokok, koperasi dapat memutus ketergantungan pada perantara berlapis yang selama ini menekan harga di tingkat petani dan menaikkan harga di tingkat konsumen. Selisih harga yang sebelumnya dinikmati tengkulak berpeluang dikembalikan kepada produsen dan anggota. Sejumlah studi memperlihatkan bahwa koperasi memperbaiki keikutsertaan petani kecil dalam rantai nilai agropangan dan memperluas akses mereka terhadap pasar (Christian et al., 2024; Blekking et al., 2021).

Peran kedua menyangkut stabilisasi harga dan pasokan. Ketika harga pangan bergejolak akibat tekanan global maupun gangguan musiman, koperasi yang memiliki gudang dan fasilitas penyimpanan dapat menjalankan fungsi penyangga sederhana di tingkat lokal. Hasil panen dapat diserap pada saat panen raya dan disalurkan secara lebih terkelola, sehingga fluktuasi harga yang tajam dapat diredam. Fungsi ini tidak menggantikan peran lembaga penyangga nasional, tetapi melengkapinya pada skala yang paling dekat dengan warga, tempat dampak gejolak harga paling cepat dirasakan. Pengalaman pada masa pandemi memperlihatkan bahwa kemampuan organisasi merekonfigurasi sumber daya secara cepat menjadi penentu ketahanan terhadap guncangan rantai pasok (Wulandhari et al., 2023).

Peran ketiga berhubungan dengan akses permodalan. Salah satu sumber kerentanan ekonomi desa adalah ketergantungan pada pelepas uang dengan bunga tinggi ketika warga membutuhkan dana cepat. Layanan simpan pinjam koperasi yang dikelola secara sehat dapat menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau dan transparan. Akses semacam ini menjadi semakin berarti pada masa ketidakpastian, ketika pengetatan moneter membuat biaya pinjaman komersial meningkat dan menyulitkan pelaku usaha kecil memperoleh modal kerja.

Peran keempat bersifat lebih mendasar, yaitu pembentukan kelembagaan ekonomi kolektif yang menumbuhkan posisi tawar warga. Hendrojogi (2015) menjelaskan bahwa kekuatan koperasi terletak pada kemampuannya menyatukan kepentingan ekonomi anggota yang secara individual lemah menjadi kekuatan bersama yang lebih besar. Dalam menghadapi tekanan pasar yang timpang, penyatuan ini memungkinkan warga desa bernegosiasi

sebagai satu kesatuan, baik dalam membeli sarana produksi maupun dalam menjual hasil. Dengan demikian, KDMP tidak hanya menjadi penyalur barang, melainkan juga sarana penguatan daya tawar komunitas desa di hadapan dinamika pasar yang berubah cepat. Penguatan kolektif semacam ini turut menumbuhkan modal sosial berupa jaringan, kepercayaan, dan kerja sama antarwarga yang menjadi modal penting bagi pembangunan pedesaan (Kustepeli et al., 2023).

Selain keempat peran tersebut, KDMP juga membuka kemungkinan diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga desa. Kehadiran berbagai unit usaha dalam satu kawasan menciptakan peluang kerja baru, mulai dari pengelolaan gerai, pergudangan, hingga distribusi, yang dapat menyerap tenaga kerja lokal. Pada masa gejolak ketika lapangan kerja di sektor formal menyempit, peluang semacam ini sangat berarti bagi warga desa, khususnya angkatan kerja muda. Dengan demikian, koperasi tidak hanya memperbaiki harga dan akses, tetapi juga memperluas basis penghidupan, sehingga ketergantungan desa pada satu sumber pendapatan yang rentan terhadap guncangan dapat dikurangi.

Keempat peran tersebut memperlihatkan bahwa kontribusi KDMP terhadap ketahanan ekonomi desa bersifat struktural, bukan sekadar karitatif. Koperasi tidak dimaksudkan membagikan bantuan, melainkan membangun mekanisme ekonomi yang memungkinkan desa mengelola sumber dayanya sendiri secara lebih adil dan efisien. Sehingga keberadaan KDMP merupakan upaya melembagakan kemandirian ekonomi desa, sebuah gagasan yang sejalan dengan semangat pembangunan dari desa yang ditegaskan dalam berbagai dokumen kebijakan pemerintah.

Pembelajaran dari Pengalaman Perkoperasian Indonesia

Indonesia memiliki sejarah panjang perkoperasian yang menyimpan pelajaran berharga, baik dari keberhasilan maupun kegagalan. Sejak gagasan koperasi diperkenalkan dan kemudian dirumuskan sebagai pilar ekonomi nasional, koperasi telah melewati berbagai fase, dari masa pergerakan, masa pembangunan yang menjadikannya instrumen kebijakan, hingga era reformasi yang menuntut koperasi berdiri di atas kaki sendiri. Diharapkan agar KDMP tidak mengulang pola lama dengan kemasan baru.

Salah satu pelajaran paling mendasar adalah bahaya menjadikan koperasi semata sebagai instrumen program. Pada masa tertentu, koperasi tumbuh pesat secara jumlah karena dorongan kebijakan dan fasilitas negara, namun banyak di antaranya layu ketika dukungan ditarik. Koperasi yang tumbuh dari atas cenderung rapuh karena tidak berakar pada kebutuhan dan partisipasi nyata anggotanya. Hatta (2015) telah mengingatkan bahwa koperasi sejati tumbuh dari kesadaran dan keswadayaan rakyat, bukan dari paksaan atau pemberian. Peringatan ini sangat relevan bagi KDMP yang lahir dari inisiatif kebijakan dengan target pembentukan yang sangat besar dalam waktu singkat.

Pelajaran kedua menyangkut pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan. Sejumlah koperasi yang bertahan dan berkembang umumnya adalah yang dikelola dengan manajemen yang baik, pembukuan yang tertib, dan pengawasan yang berjalan. Sebaliknya, koperasi yang gagal kerap terbelit persoalan pengelolaan yang tidak transparan dan lemahnya akuntabilitas. Ropke (2012) menegaskan bahwa koperasi pada hakikatnya adalah perusahaan yang dimiliki bersama, sehingga tetap tunduk pada hukum efisiensi dan tata kelola usaha. Semangat kebersamaan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan

disiplin manajerial, justru karena menyangkut dana bersama, pengelolaan koperasi menuntut kehati-hatian yang lebih tinggi.

Pelajaran ketiga adalah bahwa keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh kedekatannya dengan kebutuhan ekonomi anggota. Koperasi yang melayani kebutuhan konkret warga, seperti penyediaan sarana produksi yang lebih murah atau pemasaran hasil yang lebih pasti, cenderung memperoleh dukungan yang kuat. Sebaliknya, koperasi yang unit usahanya tidak nyambung dengan denyut ekonomi warga akan kesulitan menumbuhkan loyalitas. Bagi KDMP, pelajaran ini menggarisbawahi perlunya merancang unit usaha yang benar-benar menjawab persoalan ekonomi setempat, bukan sekadar mengikuti cetak biru yang seragam untuk semua desa.

Tantangan Pengembangan KDMP di Tengah Ketidakpastian

Potensi yang besar tidak dengan sendirinya menjamin keberhasilan. Pengalaman panjang perkoperasian di Indonesia menunjukkan bahwa banyak koperasi yang lahir dari inisiatif program berhenti pada tahap formalitas dan kehilangan denyut ekonominya tidak lama setelah berdiri. Baswir (2013) mencatat bahwa kelemahan klasik koperasi Indonesia kerap berakar pada lemahnya partisipasi anggota, tata kelola yang belum profesional, serta ketergantungan pada dukungan pemerintah yang membuat koperasi kurang mandiri. Tantangan-tantangan ini relevan untuk diwaspadai dalam pengembangan KDMP agar kesalahan masa lalu tidak terulang.

Tantangan pertama adalah tata kelola dan kapasitas sumber daya manusia. Mengelola unit usaha multifungsi yang mencakup gerai ritel, pergudangan, simpan pinjam, hingga logistik menuntut keterampilan manajemen yang tidak sederhana. Banyak desa belum memiliki tenaga pengelola dengan kemampuan administrasi keuangan dan manajemen usaha yang memadai. Tanpa pendampingan yang serius dan berkelanjutan, kompleksitas operasional ini berpotensi menjadi beban, bukan kekuatan, dan membuka celah bagi pengelolaan yang tidak transparan.

Tantangan kedua menyangkut keberlanjutan finansial dan risiko utang. Pembiayaan KDMP yang sebagian besar berbasis pinjaman menempatkan koperasi pada posisi harus menghasilkan arus kas yang cukup untuk menutup kewajiban sejak awal. Apabila volume usaha tidak mencapai skala yang ekonomis atau perputaran barang berjalan lambat, koperasi dapat menghadapi tekanan likuiditas. Risiko ini menguat justru pada masa gejolak ekonomi, ketika daya beli warga tertekan dan margin usaha menyempit. Kekhawatiran bahwa sebagian koperasi hanya akan menjadi entitas di atas kertas tanpa aktivitas ekonomi produktif merupakan persoalan nyata yang perlu dimitigasi melalui perencanaan usaha yang realistis.

Tantangan ketiga berkaitan dengan partisipasi dan rasa memiliki anggota. Koperasi yang sehat ditopang oleh keterlibatan aktif anggotanya, baik dalam permodalan melalui simpanan maupun dalam pengawasan melalui mekanisme musyawarah. Apabila KDMP dipersepsikan semata sebagai program pemerintah dan bukan sebagai milik warga, partisipasi cenderung rendah dan koperasi kehilangan basis dukungan yang menjadi sumber kekuatannya. Sitio dan Tamba (2001) menggarisbawahi bahwa keanggotaan yang aktif merupakan pembeda utama antara koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan koperasi sebagai sekadar bentuk badan usaha formal.

Tantangan keempat menyangkut tata kelola persaingan dan keberpihakan yang seimbang. Kehadiran KDMP yang didukung pemerintah berpotensi bersinggungan dengan pelaku usaha kecil yang telah lebih dulu beroperasi di desa, seperti pedagang dan warung lokal. Pengembangan yang bijak menuntut KDMP diposisikan sebagai mitra yang memperkuat ekosistem ekonomi desa, bukan sebagai pesaing yang mematikan usaha warga. Keseimbangan ini penting agar program tidak menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuannya, yaitu memberdayakan ekonomi rakyat.

Tantangan kelima bersifat lintas sektor, yaitu memastikan kesinambungan dukungan dan pengawasan dari waktu ke waktu. Program berskala besar kerap menghadapi godaan untuk mengejar capaian kuantitatif pada tahap awal, lalu kehilangan momentum pada tahap pembinaan. Padahal justru pada fase setelah pendirian itulah koperasi paling membutuhkan pendampingan, ketika persoalan operasional mulai muncul dan ketahanan kelembagaan diuji. Tanpa komitmen jangka panjang yang melampaui satu periode kebijakan, ada risiko KDMP mengalami nasib serupa dengan sejumlah program koperasi terdahulu yang meredup setelah perhatian beralih ke agenda lain.

Strategi Pengembangan KDMP yang Berkelanjutan

Berdasarkan peluang dan tantangan tersebut, pengembangan KDMP perlu diarahkan pada beberapa strategi yang saling melengkapi. Prinsip yang mendasari seluruh strategi ini adalah bahwa keberhasilan koperasi diukur dari manfaat nyata bagi anggota dan keberlanjutan usahanya, bukan dari kecepatan dan jumlah pembentukan semata.

Strategi pertama adalah penguatan tata kelola dan kapasitas pengelola melalui pendampingan yang melembaga. Pendampingan tidak cukup dilakukan sekali pada tahap pendirian, tetapi perlu berlangsung secara berkala dengan pelatihan manajemen usaha, pembukuan, dan pemanfaatan teknologi digital. Pelibatan generasi muda desa yang melek teknologi dapat menjadi penggerak modernisasi tata kelola, sekaligus membuka peluang kerja yang menahan arus urbanisasi. Digitalisasi pencatatan dan transaksi juga memperkuat transparansi yang menjadi syarat kepercayaan anggota.

Strategi kedua adalah pengembangan model usaha yang sesuai dengan potensi lokal. Tidak semua desa memiliki struktur ekonomi yang sama, sehingga penyeragaman unit usaha berisiko menghasilkan koperasi yang tidak relevan dengan kebutuhan warganya. Koperasi di desa pertanian sebaiknya menitikberatkan pada agregasi dan pengolahan hasil tani, sedangkan koperasi di desa pesisir dapat memprioritaskan rantai dingin dan pemasaran produk perikanan. Penyesuaian model usaha dengan keunggulan lokal akan meningkatkan peluang koperasi mencapai skala ekonomi yang sehat dan menghasilkan arus kas yang berkelanjutan. Bukti lintas negara menunjukkan bahwa koperasi yang dikelola sesuai konteks lokal berkontribusi pada pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan (Kalogiannidis et al., 2024), sekaligus memperkuat terbentuknya sistem pangan yang lebih berkelanjutan (de Freitas, 2024).

Strategi ketiga adalah pengelolaan risiko pembiayaan secara hati-hati. Pemanfaatan pinjaman perlu disertai rencana usaha yang realistis dan proyeksi arus kas yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kewajiban koperasi sebanding dengan kemampuan menghasilkannya. Pendekatan bertahap, yang menumbuhkan usaha sesuai kapasitas sebelum memperbesar skala, lebih aman dibandingkan ekspansi yang dipaksakan.

Mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja yang transparan juga diperlukan untuk mendeteksi dini koperasi yang menghadapi kesulitan agar dapat segera ditangani.

Strategi keempat adalah penguatan partisipasi anggota sebagai inti gerakan koperasi. Warga perlu ditempatkan bukan sebagai penerima manfaat pasif, melainkan sebagai pemilik yang turut menanggung dan menentukan arah koperasi. Penumbuhan rasa memiliki dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang hidup, keterbukaan informasi keuangan, serta pembagian hasil usaha yang adil. Sebagaimana ditegaskan dalam tradisi pemikiran koperasi Indonesia, kekuatan sejati koperasi tidak terletak pada bantuan dari luar, melainkan pada solidaritas dan keswadayaan anggotanya sendiri.

Strategi kelima adalah membangun sinergi kelembagaan tanpa mematikan ekonomi warga. KDMP perlu diintegrasikan dengan pelaku usaha desa yang telah ada, lembaga keuangan, badan usaha milik desa, serta program pemerintah lainnya sehingga membentuk ekosistem yang saling memperkuat. Keberpihakan yang seimbang menuntut koperasi diposisikan sebagai simpul yang memperluas pasar bagi produk warga, bukan sebagai pesaing yang menyingkirkan mereka. Sinergi semacam ini akan menjadikan KDMP sebagai bagian dari jaringan ekonomi desa yang lebih tangguh menghadapi guncangan.

Kelima strategi tersebut perlu dijalankan secara terpadu, bukan sebagai langkah yang terpisah. Penguatan tata kelola tidak akan berarti tanpa model usaha yang relevan, dan model usaha yang baik akan goyah jika risiko pembiayaan tidak dikelola. Begitu pula, seluruh perangkat manajerial itu hanya akan hidup apabila ditopang partisipasi anggota dan sinergi kelembagaan yang sehat. Keterpaduan inilah yang membedakan koperasi yang sekadar berdiri dari koperasi yang benar-benar berfungsi sebagai penyangga ekonomi desa. Pada akhirnya, pengembangan KDMP adalah pekerjaan jangka panjang yang menuntut kesabaran, konsistensi, dan keberanian untuk mengutamakan kualitas di atas kecepatan.

Penutup

Gejolak ekonomi nasional dan global yang berlangsung beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa ketahanan ekonomi tidak dapat hanya disandarkan pada stabilitas indikator makro. Tekanan dari luar yang merembes hingga ke harga di pasar desa menuntut adanya kelembagaan ekonomi lokal yang mampu menyangga guncangan dari bawah. Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai ikhtiar untuk membangun penyangga semacam itu, dengan menempatkan koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa yang memendekkan rantai distribusi, menstabilkan harga, memperluas akses permodalan, dan memperkuat posisi tawar warga.

Namun potensi tersebut hanya akan terwujud jika tantangan yang membayangkannya dikelola dengan serius. Tata kelola yang profesional, kapasitas pengelola yang memadai, pengelolaan risiko pembiayaan yang hati-hati, serta partisipasi anggota yang hidup merupakan syarat yang tidak dapat ditawar. Tanpa itu, KDMP berisiko mengulang pola lama, yaitu koperasi yang berdiri secara administratif tetapi kehilangan fungsi ekonominya. Keberhasilan program ini pada akhirnya tidak ditentukan oleh jumlah unit yang dibentuk, melainkan oleh sejauh mana koperasi memberi manfaat nyata bagi warga dan mampu bertahan secara mandiri di tengah ketidakpastian.

Melalui penguatan tata kelola, digitalisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan usaha produktif serta kolaborasi multipihak, KDMP dapat menjadi pilar

utama ketahanan desa. Keberhasilan pengembangan KDMP tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Dengan strategi pengembangan yang menempatkan manfaat anggota dan keberlanjutan usaha sebagai tolok ukur, KDMP berpeluang tumbuh menjadi institusi ekonomi kerakyatan yang tidak sekadar bertahan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi desa dalam jangka panjang. Pada titik itu, koperasi desa dapat menjadi salah satu jawaban konkret atas pertanyaan lama tentang bagaimana mewujudkan amanat konstitusi mengenai perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan, justru pada saat ekonomi dunia sedang penuh gejolak.

Daftar Pustaka

- Baswir, Revrison. 2013. Edisi Kedua. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta. BPFE.
- Blekking, J., Gatti, N., Waldman, K., Evans, T., & Baylis, K. 2021. The Benefits and Limitations of Agricultural Input Cooperatives in Zambia. *World Development*, 146, 105616.
- Christian, M., Obi, A., Zantsi, S., Mdoda, L., & Jiba, P. 2024. The Role of Cooperatives in Improving Smallholder Participation in Agri-Food Value Chains: A Case Study of One Local Municipality in Eastern Cape, South Africa. *Sustainability*, 16(6), 2241.
- De Freitas, A. F. 2024. Cooperativism and Its Role in Promoting Sustainable Food Systems in Portuguese Speaking Countries. *Sustainable Development*, 32(3), 1665-1677.
- Hanel Alfred. 2005. *Organisasi Koperasi: Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Organisasi Koperasi dan Kebijakan Pengembangannya di Negara Berkembang*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hatta, Mohammad. 2015. *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun: Gagasan dan Pemikiran Dr. Mohammad Hatta*. Jakarta. Penerbit Buku Kompas.
- Hendrojogi. 2015. Edisi Revisi. *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Kalogiannidis, S., Karafolas, S., & Chatzitheodoridis, F. 2024. The Key Role of Cooperatives in Sustainable Agriculture and Agrifood Security: Evidence from Greece. *Sustainability*, 16(16), 7202.
- Kustepeli, Y., Gulcan, Y., Yercan, M., & Yıldırım, B. 2023. The Role of Agricultural Development Cooperatives in Establishing Social Capital. *The Annals of Regional Science*, 70(3), 681-704.
- Ma, W., Marini, M. A., & Rahut, D. B. 2023. Farmers' Organizations and Sustainable Development: An Introduction. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 94(3), 683-700.
- Ropke, Jochen. 2012. Edisi Revisi. *Ekonomi Koperasi: Teori dan Manajemen* (Penerjemah Sri Djatnika S.). Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Sitio, Arifin & Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta. Erlangga.

Wulandhari, N. B. I., Budhwar, P., Mishra, N., Akbar, S., Do, Q., & Milligan, G. 2023. Organizational Resilience to Supply Chain Risks During the COVID-19 Pandemic. *British Journal of Management*, 34(3), 1282-1315.

Media:

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2026. www.ekon.go.id

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2025. mediakeuangan.kemenkeu.go.id

Sekretariat Presiden Republik Indonesia. 2025. www.presidentri.go.id

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Tentang Penulis



Rosti Setiawati, SE., M.Si., lahir di Bandung, 28 Pebruari 1962, Pendidikan S2 Universitas Padjadjaran (UNPAD) Program Studi Ilmu Ekonomi dan Akuntansi, S1 Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) Program Studi Manajemen Keuangan, Penulis juga aktif sebagai instruktur pelatihan di berbagai instansi. Domisili Jl. Pamagersari No. 1 Tanjungsari RT 004 RW 005 Sumedang Kode Pos 45362.